

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan bidang ekonomi di daerah Kecamatan Pasar Kemis Tangerang, menjadi bagian dari latar belakang masalah pada penelitian ini. Tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diketahui dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut seperti pengangguran, tingkat pendapatan, sistem pendidikan negara tersebut, dan pelayanan kesehatan. Namun, akibat penyalahgunaan anggaran negara oleh aparat pemerintah, muncul beberapa masalah yang berdampak pada kacaunya perekonomian negara. Parameter penting untuk keberhasilan pembangunan pedesaan adalah pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Semua negara berusaha untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Namun, masalah umum di negara berkembang adalah jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.¹ Kemiskinan selalu menjadi topik yang tak kunjung henti, masalah yang kompleks dan sudah tidak asing lagi di dengar oleh semua kalangan masyarakat yaitu kemiskinan. Sebagai masalah global yang tak kunjung henti, kemiskinan sering dikaitkan dengan kesulitan, kesukaran, dan kekurangan dalam berbagai situasi kehidupan. Dengan kata lain, kemiskinan adalah kondisi rendahnya taraf hidup di suatu daerah atau rendahnya tingkat ekonomi baik di perkotaan maupun di pedesaan.²

¹ Riska Dewi Putri dan Hasdi Aimon, "Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Korupsi di Indonesia di Negara ASEAN *Lower Middle Income*," *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 2, No.3, (2020), h. 12.

² Chelsia Janesta, "Kemiskinan Menjadi Suatu Masalah Sosial yang Terjadi di Tengah-Tengah Masyarakat," *Jurnal Socius*, Vol. 1, No. 1, (2019), h. 1.

Suatu sistem ekonomi kerakyatan yang membutuhkan sistem ekonomi layanan berpartisipasi, dapat memberikan akses maksimum secara adil dan merata. Untuk semua lapisan masyarakat baik dalam produksi dan distribusi maupun konsumsi nasional, kemampuan dan penguatan masyarakat serta mekanismenya pelaksanaan yang selalu mempertimbangkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Itu semua sebagai pendukung kehidupan untuk mewujudkan kesejahteraan yang adil, bagi semua berkelanjutan Indonesia. Tujuan seperti itu juga terkandung dalam pikiran dasar sistem ekonomi kerakyatan, sebagaimana termaktub dalam filsafat dasar negara kita. Perekonomian nasional sendiri harus dimaknai sebagai segalanya kegiatan ekonomi masyarakat yang keduanya diuntungkan posisi sebagai produsen, pedagang, dan konsumen.³

Pada dasarnya manusia adalah kekayaan sejati suatu bangsa, pembangunan manusia menghadirkan pembangunan manusia sebagai tujuan akhir bukan sarana pembangunan. Tujuan utama pembangunan adalah untuk menciptakan lingkungan dimana masyarakat dapat berumur panjang, sehat dan produktif *United Nations Development Program (UNDP)*. Ini tampaknya sederhana, tetapi sering dilupakan dalam mengejar kekayaan dan uang jangka pendek. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses memperluas pilihan masyarakat (*Expanding People's Choices*). Di antara banyak pilihan tersebut, pilihan yang paling penting adalah panjang umur dan sehat, mendapatkan pendidikan, dan memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk hidup layak. Paradigma pembangunan yang berkembang adalah

³ Mukhtar Abdul Kader, "Peran UKM dan Koperasi dalam Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan di Indonesia," *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, Vol. 8 No. 1, (2018), h. 17.

pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia, berdasarkan kualitas hidup masyarakat di setiap negara. Dan salah satu metrik yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup masyarakat, adalah kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM). tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi (daya beli).⁴

Ketika berbicara tentang Sumber Daya Manusia (SDM). Indonesia memiliki badan usaha yang disebut koperasi, yaitu suatu kesatuan ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip koperasi. Merupakan gerakan ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan dengan pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa, koperasi adalah anggota-anggota keluarga yang harus bekerja untuk kesejahteraan anggotanya sesuai dengan prinsip-prinsip operasi koperasi.⁵ Rendahnya kesadaran masyarakat untuk bergabung dikoperasi masih banyak, masyarakat di Kabupaten Tangerang yang belum menyadari manfaat bergabung dengan koperasi. Mereka lebih memilih untuk memulai usaha secara individu, padahal jika bergabung dengan koperasi mereka dapat memperoleh bantuan modal serta akses ke pasar yang lebih luas.⁶

Salah satu jenis koperasi simpan pinjam diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan permodalan, khususnya bagi kegiatan produktif seperti pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal ini harus didukung dengan kebijakan yang tepat

⁴ Heppi Syofya, "Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 15, No. 2, (2018), h. 177

⁵ Donald Samuel Slamet Santosa dan Ida Yuliana Putri, "Peran Koperasi Unit Desa Dalam Kegiatan Usaha Masyarakat," *FIRM Journal of Management Studies*, Vol. 3 No. 2, (2018), h. 183

⁶ Sabam Simbolon, "Analisa Keberadaan Koperasi *Analysis Of Existence Of Cooperation In* Tangerang Regency," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 16, No. 1, (2018), h. 89–103.

dari pemerintah. Dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah, nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Maka semakin jelas bahwa untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan koperasi. Kegiatan Usaha Simpan Pinjam perlu ditumbuhkembangkan, agar jenis koperasi simpan pinjam dan lainnya maju.⁷

Kemudian adapun ayat al-qur'an yang menjelaskan secara tidak langsung mengenai Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Kinerja Umkm yakni pada kitab suci al-qur'an surat Al-Maidah ayat 2. Ayat ini mengajarkan pentingnya tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan. Dalam konteks UMKM, koperasi dapat menjadi alat untuk saling membantu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ
وَلَا الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah) jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram) jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda) dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali

⁷ Hasanah, Azimah Hanifah, "Implementasi Model Pengembangan Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam (Ksp)," *Jurnal Muhammadiyah Manajemen Bisnis*, Vol. 1 No. 1, (2020), h. 37.

kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi-mu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. (QS. Al-Maidah: 2)⁸

Dari ayat di atas dapat ditafsirkan secara sederhana bahwa dalam konteks koperasi, ayat ini dapat diartikan sebagai pentingnya koperasi dalam membantu dan mendukung usaha kecil dan menengah agar dapat berkembang dan meningkatkan kinerjanya. Koperasi dapat membantu UMKM dalam hal pemasaran produk, pendistribusian, dan pembiayaan. Selain itu, koperasi juga harus menjalankan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh anggotanya, sehingga tercipta keseimbangan dan keadilan dalam distribusi keuntungan.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempertahankan posisinya dalam segala keadaan. Agar masyarakat dapat mengetahui dan menganalisis pentingnya usaha kecil dan menengah di tingkat daerah, dalam upaya meminimalkan pengangguran dan meningkatkan taraf hidup. Sektor UMKM di Indonesia yang tercatat dalam data Badan Pusat Statistik tahun 2013 sebanyak 56.534.592 orang, dan tingkat penyerapan tenaga kerja tertinggi sebanyak 107.657.509 orang. Melihat data tersebut, UKM dikenal sebagai sektor tenaga kerja dan ekonomi yang penting, karena menyerap banyak pekerja kelas menengah ke bawah dan menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia. Salah satu peran UKM dalam pemulihan perekonomian nasional terjadi pada saat

⁸ Al-Quran dan Terjemahannya, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=1&to=120>. Diakses pada tanggal 13 April 2023. Pada pukul 11:28 WIB.

krisis keuangan tahun 1997, ketika UKM dianggap sebagai sektor yang dapat menyelamatkan dan memulihkan perekonomian Indonesia.⁹ Berikut tabel perkembangan UMKM Provinsi Banten sejak tahun 2018 hingga tahun 2020.

Tabel 1.1 Jumlah UMKM di Provinsi Banten Tahun 2018-2020

Wilayah Binaan	Jumlah UMKM Menurut Wilayah Binaan di Provinsi Banten								
	Aktif			Non Aktif			Jumlah		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Kab. Pandeglang	465	482	505	100	100	99	565	582	604
Kab. Lebak	521	528	530	322	322	322	843	850	852
Kab. Tangerang	1126	578	588	433	1005	1003	1559	1583	1591
Kab. Serang	511	532	620	814	814	818	1325	1346	1438
Kota Tangerang	421	289	290	480	676	873	901	965	1163
Kota Cilegon	301	298	301	230	257	257	531	555	558
Kota Serang	166	133	131	202	238	237	368	371	368
Kota Tangerang Selatan	328	332	388	289	303	301	626	635	689
Provinsi Banten	187	270	329	62	62	62	249	332	391
Pusat	44	282	367	22	21	21	66	303	388
Jumlah	4070	3724	4049	2954	3798	3993	7033	7522	8042

(Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten)¹⁰

Berdasarkan tabel diatas Kabupaten Tangerang termasuk daerah terbanyak dalam pertumbuhan UMKM setiap tahunnya, Kabupaten Tangerang merupakan salah satu daerah yang berada di wilayah Provinsi Banten. Diuntungkan dengan potensi fiskal yang memadai

⁹ Nida Alfi Nur Ilmi, “Peran UMKM Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran Masyarakat dan Strategi UMKM Ditengah Pandemi Covid-19, “ *Jurnal Manajemen Bisnis*, Vol. 18, No. 1, (2021), h. 97-98.

¹⁰ Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten [https:// dinkopukm. bantenprov. go.id/](https://dinkopukm.bantenprov.go.id/), diakses oleh Penulis pada 05 Februari 2023. Diakses pada tanggal 14 April 2023. Pada pukul 10.00 WIB.

untuk memandirikan daerahnya, kondisi geografis Kabupaten Tangerang yang berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat ekonomi Indonesia. Seharusnya dapat menjadikan nilai tambah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Wilayah Kabupaten Tangerang dibagi atas daerah industri, daerah penyangga ibu kota, serta daerah yang juga memiliki pesisir pantai. Potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Tangerang ini seharusnya dapat dikelola oleh pemerintah daerah, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mensejahterakan masyarakatnya. Tingginya angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tidak terlepas dari peran Pemerintah Daerah terutama dalam penyelenggaraan APBD terutama pengeluaran pemerintah.¹¹

Koperasi Pakem Berkah Bersama merupakan suatu lembaga atau organisasi terutama bergerak dalam bidang pengolahan industri, logistik, dan perdagangan. Didirikan sejak tahun 2018 yang terletak di daerah Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang. Koperasi ini didirikan oleh ibu Kristina. Selain menjadi pendiri Koperasi Pakem Berkah bersama, beliau juga sebagai ketua organisasi UMKM se-Kecamatan Pasar Kemis. Sehingga misi utamanya adalah meningkatkan kemajuan dan pengembangan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penerapan transfer teknologi terintegasi. Hal ini bertujuan agar setiap anggota mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan produknya, dapat memiliki nilai jual yang lebih tinggi di pasar lokal maupun internasional.

¹¹ Marthalina, "Peran Pemerintah Daerah dalam Mengetaskan Kemiskinan di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten", *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, Vol. 10, No. 1, (2018), h. 2.

Sebagaimana dengan tujuan didirikannya untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, maka koperasi ini sering memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM untuk membantu berkembangnya usaha UMKM. Berdasarkan fenomena di atas, penulis ingin mengkaji lebih lanjut penelitian dengan judul **“Peran Pakem Berkah Bersama Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Kinerja UMKM Studi Di Desa Sukamantri, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas. Dalam penulisan ini, penulis membatasi permasalahan pada pemberdayaan masyarakat melalui potensi sumber daya manusia dilakukan di Desa Sukamantri, Kecamatan Pasar Pemis, Kabupaten Tangerang, agar kemudian dalam penulisan ini menjadi lebih fokus, terarah dan pembahasan tidak melebar maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi Koperasi Pakem Berkah Bersama di Pasar Kemis Kabupaten Tangerang?
2. Apa Peran Koperasi Pakem Berkah Bersama di Pasar Kemis Kabupaten Tangerang?
3. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam menjalankan program Koperasi Pakem Berkah Bersama di Pasar Kemis Kabupaten Tangerang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi Strategi Koperasi Pakem Berkah Bersama di Pasar Kemis Kabupaten Tangerang
2. Bertujuan untuk mendeskripsikan Peran Koperasi Pakem Berkah Bersama di Pasar Kemis Kabupaten Tangerang
3. Bertujuan untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam menjalankan program Koperasi Pakem Berkah Bersama di Pasar Kemis Kabupaten Tangerang

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan yang sudah dipaparkan di atas, maka penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan penulis mengenai peran koperasi pakem berkah bersama dalam meningkatkan pemberdayaan kinerja usaha mikro kecil dan menengah di Desa Sukamantri Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang, serta diharapkan dapat menjadi sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari selama di bangku perkuliahan.

2. Secara kebijakan

- a. Bagi peneliti

Agar penulis atau peneliti dapat memberikan suatu pengalaman berpikir ilmiah melalui penyusunan skripsi ini, supaya dapat

melaksanakan setiap proses penelitian dengan baik demi menambah banyak pengetahuan dan wawasan. Serta menjadi seorang peneliti yang andal dalam hal yang berhubungan dengan pengembangan masyarakat islam.

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi pengembangan keilmuan yang diharapkan dapat diambil manfaatnya oleh pembaca serta referensi penelitian selanjutnya dan memberikan masukan kepada koperasi pakem berkah bersama Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang selaku pemberi pelayanan sosial di Desa Sukamantri untuk menjadi lebih baik dan maju dalam memberdayakan masyarakat.

c. Bagi akademisi

Hasil kajian atau penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan atau bahan rujukan dalam mengembangkan segala karya ilmiah bagi akademisi, baik di kalangan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten maupun pihak lain.

E. Tinjauan Pustaka

Sebagai bahan perbandingan dan bahan kajian dalam penulisan skripsi ini, Berdasarkan hasil pencarian dan penelitian. Penulis akhirnya menemukan beberapa hasil dari penelitian sebelumnya penting untuk studi ini. Meskipun ada beberapa koneksi penulis gunakan sebagai bahan referensi relevan dengan penelitian ini, adapun yang digunakan untuk memperoleh itu antara lain, penelitian tentang upaya yang digunakan dalam memberdayakan masyarakat.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Fadliyansah yang berjudul “Peran Koperasi Simpan Pinjam dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya Meulaboh)” di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.¹² Kesimpulan yang didapatkan dari skripsi tersebut, yaitu peran koperasi simpan pinjam (KSP) Mandiri Jaya Meulaboh terfokus sebagai penyedia modal usaha dalam jangka waktu tertentu. KSP dan USP memiliki peran besar dalam pemberdayaan UMKM khususnya untuk penyediaan permodalan bagi UMKM, karena lembaga keuangan formal *non* bank amat diperlukan dalam mendukung percepatan pemberdayaan UMKM terutama bagi UMKM di pedesaan Aceh Barat. Dimana akses lembaga perbankan masih terbatas. Kemudian untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi dan penyimpanan uang selain bank sehingga dalam kegiatan UMKM bagi para usahawan dapat mengembangkan usahanya lebih besar lagi. Koperasi juga memberikan penyuluhan dan pendampingan serta mencari pasar penjualan untuk pelaku UMKM, agar para pelaku UMKM di daerah Aceh Barat tidak tutup apalagi saat pandemi. Berdasarkan hal tersebut perbedaan penelitian yang di kaji oleh penulis dalam meneliti peran koperasi dalam pemberdayaan kinerja UMKM melalui Koperasi Pakem Berkah Bersama terdapat pada akses strategi pendidikan, ekonomi, dan keterampilan. Selain itu UMKM yang bergabung dalam Koperasi PBB dapat memperkenalkan produknya hingga ke luar negeri.

¹² Fadliyansah, “Peran Koperasi Simpan Pinjam dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),” (Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021)

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Halimatus Sa'diyah yang berjudul "Upaya *Cooperative Trading House (CTH)* Dinas Koperasi & UKM Provinsi Jawa Timur Melalui Komunikasi Branding Dalam Meningkatkan Penjualan Produk UMKM Di Masa Pandemi *Covid 19*" di Universitas Bhayangkara Surabaya, tahun 2021.¹³ Kesimpulan yang didapatkan dari skripsi tersebut, yaitu bahwa kegiatan UMKM sebelum pandemi dilakukan dengan mengadakan bazaar dan pameran, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur tidak bisa mengadakan kegiatan tersebut lagi selama pandemi, ketika semua aksi mengundang kerumunan besar tidak diperbolehkan atau dilarang untuk memperlambat penyebaran virus Covid-19. Menghilangkan fitur yang dapat membuat banyak produksi massal pasar UMKM yang dulunya menjadi sumber pendapatan terbesar menghilang. Di dalam situasi ini, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur akan tetap beroperasi dukung pelaku UMKM dengan menyelenggarakan pelatihan dan webinar implementasi *branding*, untuk lebih mengembangkan branding yang sudah ada. Dengan adanya masa pandemi pelaku UMKM dipaksa untuk mengatasi dan merubah pola kebiasaan, tentu saja ini menjadi sulit bagi masyarakat awan yang tidak melek teknologi. Dinas koperasi dan UKM Jawa Timur memfokuskan pelaku UMKM berbenah dalam memproduksi dan penjualan produknya dengan cara memanfaatkan sosial media, meningkatkan kualitas pengemasan, dan menggunakan fitur *market place*. Berdasarkan hal tersebut perbedaan penelitian yang dikaji oleh penulis dalam meneliti peran koperasi dalam pemberdayaan

¹³ Halimatus sa'diyah, "Upaya *Cooperative Trading House (CTH)* Dinas Koperasi & UKM Provinsi Jawa Timur Melalui Komunikasi Branding Dalam Meningkatkan Penjualan Produk UMKM Di Masa Pandemi *Covid 19*," (Skripsi Universitas Bhayangkara Surabaya, 2021)

kinerja UMKM melalui Koperasi Pakem Berkah Bersama tidak beda jauh, karena Koperasi PBB masih tetap exis dari masa pandemi hingga pandemi usai. Strategi Koperasi PBB dalam hal memproduksi barang dan kuliner penjualannya secara *online* dan *offline*, terlebih produk UMKM di Koperasi PBB sudah tersebar di beberapa daerah Indonesia hingga luar negeri.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Rizki Fathia Rahmah yang berjudul “Peran Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di sekitar Pondok Pesantren Roudlatul Qur’an Kota Metro” tahun 2018.¹⁴ Kesimpulan yang didapatkan dari skripsi tersebut, yaitu koperasi ini mampu mengurangi ketergantungan usaha mikro, kecil dan menengah terhadap praktik rentenir atau solusi penyimpanan uang selain bank. Koperasi Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Kota Metro memberikan pinjaman usaha untuk pengembangan pertumbuhan usaha masyarakat sekitar pondok pesantren dengan memperoleh modal usaha melalui simpan pinjam, khususnya memberikan modal investasi kepada anggota koperasi. Berdasarkan uraian tersebut, skripsi ini terfokus pada peminjaman modal tanpa melibatkan rentenir atau bank untuk mensejahterakan anggotanya, sedangkan penelitian yang di kaji oleh penulis dalam meneliti peran koperasi dalam pemberdayaan kinerja UMKM melalui Koperasi Pakem Berkah Bersama terdapat pada akses strategi bidang pendidikan, bidang ekonomi, dan keterampilan anggota koperasi. Selain itu UMKM yang bergabung dalam Koperasi Pakem Berkah Bersama dapat memperkenalkan produknya hingga ke luar

¹⁴ Rizki Fathia Rahmah, ” Peranan Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Pondok Pesantren Roudlatul Qur’an Kota Metro,” (Skripsi Insitut Agama Islam Negeri, Metro, 2018)

negeri, karena Koperasi Pakem Berkah Bersama merupakan koperasi konsumen yang menjualkan berbagai macam produk hasil UMKM untuk dipasarkan ditingkat nasional maupun internasional.

F. Kerangka Teori

1. Peran

Menurut Riyadi mengutarakan bahwa definisi peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab, dan lainnya). Di dalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuannya menjalankan berbagai peran.¹⁵

Istilah “peran” sebagai konsep sosiologis pertama kali muncul pada tahun 1930-an dan 1940-an dalam karya pemikir klasik seperti George Herbert Mead, Ralph Linton, dan Jacob Moreno. Dengan perspektif simbolik-interaksionisnya, berfokus pada peran faktor individu, pengembangan peran melalui interaksi sosial, dan berbagai konsep kognitif yang membantu aktor sosial memahami dan menginterpretasikan instruksi perilaku untuk diri mereka sendiri dan

¹⁵ Syaron Brigitte Lantaeda, Florence Daicy J. Lengkong, and Joorie M Ruru, “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon,” *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 4, No. 48, (2017), h. 2.

orang lain. Sementara itu, menggunakan pendekatan struktural untuk menjelaskan karakteristik perilaku seseorang dari posisi sosial tertentu dalam sistem sosial yang mapan. “Peran” kemudian dikonseptualisasikan sebagai harapan normatif yang tertanam kuat dan memberikan dasar bagi munculnya perilaku tersebut. Di sisi lain, pemikiran berbeda dari hubungan antara ekspektasi peran dan perilaku, kondisi sosial yang menghasilkan ekspektasi tersebut, dan cara seseorang mempersepsikan ekspektasi orang lain dan memahami pengaruhnya terhadap perilaku. Teori peran, secara umum, berfokus pada salah satu karakteristik perilaku sosial yang paling penting, yaitu bahwa orang berperilaku berbeda dan dapat diprediksi tergantung pada situasi dan identitas sosial masing-masing individu.

Teori ini menjelaskan konsep peran dengan asumsi awal bahwa orang menempati posisi sosial tertentu yang memiliki harapan terhadap perilaku mereka sendiri dan orang lain di sekitarnya. Ekspektasi kemudian diartikan sebagai keyakinan yang berkaitan dengan perilaku pribadi maupun keyakinan berkaitan atau berhubungan dengan orang lain. Selain itu, peran juga harus mencerminkan posisi seseorang dalam sistem sosial dan terkait dengan hak dan kewajiban serta kekuasaan dan tanggung jawab. Interaksi antar individu dalam sistem sosial ini kemudian berlangsung dengan cara-cara tertentu dan berperan apa saja dalam mengantisipasi perilaku orang lain di sekitarnya. Beberapa peneliti telah menerapkan konsep teori peran untuk menjelaskan hubungan antara peran yang diketahui dan ditugaskan seseorang dan implementasi tugas dan aktivitas yang dilakukan di lingkungan kerja.

Bahwa konflik peran, ambiguitas peran, dan kelebihan peran dapat menurunkan kepuasan kerja dan kualitas kinerja di wilayah DKI

Jakarta. Dalam studi lain mengamati munculnya kesenjangan ekspektasi audit antara auditor internal dengan manajemen dan pemilik perusahaan besar di Nigeria. Di satu sisi manajemen dan pemilik bisnis memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap peran auditor internal dalam mencegah kecurangan keuangan, namun di sisi lain auditor internal tidak percaya dengan peran yang dimilikinya. Studi ini juga menemukan bahwa rendahnya kepercayaan diri auditor internal berhubungan langsung dengan rendahnya tingkat keberhasilan pekerjaan audit.¹⁶

2. Koperasi

Menurut Rudianto mendefinisikan koperasi sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis.¹⁷ Berdasarkan definisi yang telah dipaparkan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa koperasi adalah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dijalankan oleh anggotanya untuk kepentingan masyarakat serta kegiatan yang dilakukan oleh koperasi dilandasi oleh pemikiran bahwa kegiatan ekonomi kerakyatan harus berpedoman pada konsep kekeluargaan. Koperasi bersifat terbuka untuk umum. Setiap orang tanpa memandang golongan, aliran, kepercayaan atau agama orang itu, dapat diterima

¹⁶ Made A. P, Gusti A. K, dkk, "Teori Peran dan Konsep *Expectation-Gap* Fungsi Pengawasan dalam Pengelolaan Keuangan Desa," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 2, No. 4, (Desember 2018), h. 452-453.

¹⁷ Basuki Sri Rahayu and Heriyanta Budi Utama, "Pendampingan Pembentukan Badan Usaha Koperasi Simpan Pinjam 'Makmur Jaya' Kelurahan Banjarsari Kecamatan Banjarsari Surakarta," *WASANA NYATA : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol.4, No. 1, (2020), h. 44.

sebagai anggota koperasi. Koperasi memang merupakan salah satu wadah persatuan orang-orang yang miskin dan lemah ekonominya, untuk bekerjasama memperbaiki nasib dan meningkatkan taraf hidup mereka.¹⁸

a. Prinsip-prinsip Koperasi

Dalam hal ini Ibnu Soedjono berpendapat bahwa koperasi memasukkan prinsip swadaya, tanggung jawab sendiri, demokrasi, kesetaraan, keadilan dan solidaritas. Mengikuti tradisi para pendirinya, para anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etika, kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap sesama. Lebih lanjut Soedjono menjelaskan bahwa asas swadaya (otonomi) dan kohesi (kerja sama) dalam lembaga koperasi dapat menghasilkan efek sinergis. Efek ini menjadi kekuatan yang kuat, koperasi dapat bersaing dengan lembaga ekonomi lainnya. Sinergi ini terjadi hanya ketika anggota koperasi mengoptimalkan partisipasinya, baik sebagai pemilik partisipasi maupun sebagai pengguna partisipasi. Berikut 7 Prinsip kerja sama ICA merumuskan prinsip kerja sama:

- Koperasi adalah perkumpulan sukarela yang terbuka bagi siapa saja yang berhak menerima jasa perkumpulan dan siap menerima tanggung jawab keanggotaan tanpa membedakan jenis kelamin, sosial, ras, politik atau agama.
- Koperasi adalah perkumpulan demokratis yang diatur oleh anggota yang secara aktif berpartisipasi dalam politik perkumpulan dan pengambilan keputusan.
- Rekan kerja menyumbang adil dan terkendali modal demokrasi kooperatif mereka.

¹⁸ Widiyanti, Ninik, *Manajemen Koperasi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010).

- Koperasi adalah perkumpulan yang berdiri sendiri, berpemerintahan sendiri dan dikendalikan oleh para anggotanya.
- Koperasi memberikan pelatihan bagi anggotanya, pejabat terpilih, manajer dan karyawan sehingga mereka dapat berkontribusi secara efektif untuk pengembangan koperasi.
- Koperasi dapat memberikan layanan yang paling efektif kepada anggotanya dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama di tingkat lokal, nasional, nasional dan regional. struktur regional dan internasional.
- Koperasi berusaha untuk mendukung keberlanjutan komunitas mereka. melalui prosedur yang disetujui oleh anggotanya.¹⁹

b. Jenis-Jenis Koperasi

Setelah dijelaskan pengertian koperasi, berikut merupakan paparan dari beberapa jenis koperasi. UUD Nomor 17 tentang Perkoperasian dibatalkan pada hari rabu tanggal 28 mei 2014 oleh MK dan kembali ke UUD no 25 than 1992 tentang perkoperasian. Dalam UUD nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian jenis koperasi dibedakan menjadi lima yaitu:

1. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dibidang simpanan dan pinjaman sebagai salah satu usaha yang melayani anggotanya.

2. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatan jual beli menjual barang konsumsi.

¹⁹ Mudemar A. Rasyidi, "Mengembalikan Koperasi Kepada Jatidirinya Berdasarkan Ketentuan-Ketentuan dan Peraturan-Peraturan Yang Berlaku di Indonesia," *Jurnal M-Prograss*, (2021), h. 150-151.

3. Koperasi Produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang beranggotakan para pengusaha kecil dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya.

4. Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran adalah koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk/jasa koperasi atau anggotanya.

5. Koperasi Jasa

Koperasi jasa adalah koperasi yang bergerak dibidang usaha jasa lainnya dan koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non anggota.²⁰

c. Fungsi dan Tujuan Koperasi :

Setelah penjelasan jenis-jenis koperasi, berikut merupakan pemaparan fungsi koperasi dan tujuan koperasi. Fungsi Koperasi dan Peran Koperasi tercantum dalam UU No.25 Tahun 1992 ayat 3 pasal 4, sebagai berikut :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;

²⁰ Ni Made Intan, dkk, "Pengaruh Ukuran Koperasi, Jenis Koperasi Serta Pengalaman Kepengurusan Manajemen Terhadap Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pada Koperasi Di Kabupaten Tambanan". *Jurnal Aplikasi Akutansi*, Vol. 3, No. 1, (2018), h. 153-154

3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Selanjutnya menurut Kartasapoetra dalam Alwani menjelaskan bahwa fungsi dari koperasi ialah :

1. Mempersatukan, mengarahkan dan mengembangkan daya kreasi, daya cipta serta daya usaha rakyat, terutama mereka yang serba terbatas kemampuan ekonominya agar mereka dapat turut serta dalam kegiatan ekonomi.
2. Koperasi bertugas meningkatkan pendapatan dan menimbulkan pembagian yang adil dan merata atas pendapatan tersebut.
3. Koperasi bertugas mempertinggi taraf hidup dan kecerdasan bangsa Indonesia.
4. Koperasi berperan serta aktif dalam membina kelangsungan perkembangan demokrasi ekonomi.
5. Koperasi berperan serta secara aktif dalam menciptakan atau membuka lapangan kerja baru.²¹

d. Strategi Koperasi

Menurut Stephani K. Marrus strategi diartikan sebagai proses penentuan rencana manajemen puncak konsisten dengan tujuan jangka panjang organisasi yang bersangkutan dengan pengembangan suatu

²¹ Muhammad Alfin Alwani, "Peranan Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota," (Thesis, Universitas Islam Riau, 2018), h. 18.

metode atau usaha untuk mencapai tujuan yang dapat dicapai. Dalam menghadapi suatu yang berkenaan dengan sebuah pencapaian maka diperlukan strategi agar tepat ketujuan. Guna mendapatkan peluang dalam meningkatkan pengembangan anggota melalui koperasi, maka diperlukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan. Koperasi memiliki berbagai strategi dalam meningkatkan sumber daya anggota, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan pendekatan holistik untuk mengimplementasikan ide-ide membuat rencana dan melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan dan gol sesuai dengan peluang.²² Berikut merupakan pemaparan strategi koperasi :

Manajemen pemasaran dibagi menjadi empat strategi biasa disebut bauran pemasaran atau marketing mix. Strategi Ini adalah strategi produk, tempat, harga dan promosi.

- Strategi produk

Produk mengacu pada produk dan layanan yang ditawarkan oleh perusahaan sasaran pasar menawarkan produk yang dibutuhkan konsumen perusahaan harus selalu memperhatikan kebutuhan, keinginan, permintaan konsumen.

- Strategi tempat

Lokasi termasuk operasi perusahaan yang menghasilkan produk tersedia untuk pelanggan sasaran. Menurut Kashmir, itu menjelaskan saluran penjualan adalah jaringan organisasi dan fungsi menghubungkan produsen dengan pengguna akhir.

²² Husein Umar, "Strategi Manajemen in action", (Jakarta: PT, Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 31.

- Strategi penetapan harga

Harga adalah jumlah uang yang harus dibayar pelanggan sesuai produk yang dipatkannya. Harga adalah satu-satunya elemen dalam campuran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Menurut Kotler, Harga adalah apa yang konsumen tukarkan dengan utilitas antara konsumsi, menggunakan atau memiliki barang dan jasa. Pada keputusan harga yang biasanya ditentukan adalah dengan metode bid and offer sebuah pertanyaan. Etika pemasaran dalam konteks harga:

- Biaya produksi yang wajar
- Sebagai sarana persaingan yang sehat
- Diukur terhadap daya beli masyarakat
- Margin Keuntungan yang Wajar
- Sebagai alat dan daya tarik bagi masyarakat

- Strategi periklanan

Strategi adalah bagian dari bauran pemasaran peran penting. Periklanan adalah kegiatan yang dilakukan ketergantungan atau bisnis untuk menarik atau mendorong konsumen - konsumen membeli produk yang ditawarkan. Tapi satu hal tidak baik jika penjual melebih-lebihkan produk yang dia jual meskipun kualitasnya tidak sebaik yang dia katakan.²³

3. Pemberdayaan

Adapula rangkaian pembahasan tentang pemberdayaan. Berikut ini penjelasan menurut Sumardjo, penguatan masyarakat merupakan hal mendasar proses pengembangan potensi dan kemampuan

²³ Reno Giovani. S, Peran Stakeholders dalam Pengembangan Koperasi Konsumsi Konsumen Syari'ah BMT PAT Sepakat, (Thesis, Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup), 2023), h. 29-30

individu/masyarakat untuk memperkuat kemampuannya dalam memecahkan masalah yang dihadapinya sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemberdayaan masyarakat ini terjadi melalui kegiatan pembelajaran/pendidikan dan upaya lain (misalnya pendampingan penyediaan fasilitas khusus) yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemauan mereka untuk bertindak menghadapi masalah dan ancaman yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari yang dihadapkan pada kehidupan. Belajar adalah kegiatan aktif yang bertujuan untuk mengembangkan pengertian, pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang mempengaruhi fungsi kecerdasan dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan seseorang dalam berkehidupan. Pemberdayaan masyarakat berasal dari istilah keberdayaan dalam konteks sosial, yaitu kemampuan seseorang yang berada dalam masyarakat untuk membangun keberdayaan. kepada masyarakat yang terkena dampak. Pemberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat untuk bertahan hidup, berkembang, dan maju.²⁴

Pasal 4 dari Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 memuat prinsip-prinsip pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.

²⁴ Rusdi Hidayat N, Sonja Andarini, "Strategi Pemberdayaan UMKM di Pedesaan Berbasis Kearifan Lokal di Era Industri 4.0 Menuju Era *Society 5.0*," *Jurnal Bisnis Indonesia*, (2020), h. 94.

2. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan
3. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Tujuan Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

Setiap kegiatan yang dilakukan pasti memiliki tujuan, sama halnya dengan tujuan dilaksanakannya pemberdayaan UMKM. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 5 tujuan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) secara ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
3. Meningkatkan peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.²⁵

Adapula tujuan menurut Isbandi yaitu tujuan di bidang sosial atau bidang pendidikan tidak selalu sama dengan tujuan pemberdayaan di

²⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bab 1, Pasal 1 & 5, https://ppid.unud.ac.id/i_mg/admin/page_attc/a16a3_dba809cb5346a0cbf2c0073cd6d.pdf, diakses oleh Penulis pada 05 Maret 2023

bidang ekonomi. Tujuan pemberdayaan di bidang ekonomi, pendidikan, dan sosial adalah agar kelompok sasaran mampu mengelola usahanya, memasarkan produknya, dan membentuk siklus pemasaran dengan cara yang relatif stabil dengan tepat. Dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan sosial didorong untuk menggali berbagai potensi yang ada dalam dirinya dan memanfaatkan potensi tersebut untuk memecahkan masalah.²⁶

b. Tahapan Pemberdayaan

Dari pemaparan diatas selanjutnya tahapan persiapan. Menurut Isbandi Rukminto dalam bukunya membagi tahapan pemberdayaan masyarakat menjadi tujuh tahapan. Beberapa tahapan tersebut yaitu :

- Tahapan Persiapan (*engagement*)

Pada tahap persiapan ini, setidaknya ada dua di antaranya langkah-langkah yang harus diambil, atas nama pejabat dan persiapan lapangan Dalam hal ini para pejabat siap menjadi tenaga kerja Memperkuat komunitas, yang juga mungkin Pekerja masyarakat dan persiapan lapangan adalah prasyarat untuk keberhasilan program pemberdayaan masyarakat yang pada dasarnya mencoba melakukannya secara tidak langsung.

- Tahapan Pengkajian (*assessment*)

Proses pengkajian dapat diselesaikan di sini secara individu oleh tokoh masyarakat (*key person*), tetapi juga bisa melalui kelompok internal hadirin Pada fase ini, pejabat bertindak sebagai agen perubahan mencoba untuk mengidentifikasi

²⁶ Isbandi Rukminto Adi, *Pemikiran-Pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2002), h. 163-164

masalah kebutuhan yang dirasakan (Mengetahui kebutuhan) dan juga sumber daya klien. Di dalam ada beberapa teknik untuk menganalisis kebutuhan masyarakat dapat digunakan untuk evaluasi. Baik pendekatan kuantitatif maupun kualitatif.

- Tahapan Perencanaan Alternatif Program/Kegiatan
Pada fase ini, petugas bertindak sebagai agen perubahan upaya partisipatif untuk melibatkan warga negara dalam berpikir masalah yang mereka hadapi dan bagaimana menyelesaikannya. Kami berusaha untuk mengatasi masalah-masalah di masyarakat diharapkan mampu memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat mereka lakukan.
- Tahap Pemformulasian Rencana Aksi
Pada saat itu, seorang petugas dari setiap regu membantu membentuk pemikiran mereka di masyarakat dalam bentuk tertulis, terutama yang berkaitan dengan produksi proposal untuk donatur.
- Tahap Pelaksanaan (kegiatan)
Fase implementasi ini adalah salah satu fase tersebut yang terpenting dalam program pemberdayaan masyarakat, karena sesuatu yang direncanakan dengan baik berhasil menyimpang dari implementasi lokal jika tidak ada kerjasama antara pejabat dan warga negara dan kerjasama antar warga juga pertentangan antar kelompok sipil dapat menghambat pelaksanaan rencana aksi.
- Tahap Evaluasi
Evaluasi sebagai proses pengawasan warga dan staf program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan harus dilakukan dengan partisipasi warga. Dengan partisipasi warga, sistem akan

dibangun di dalam masyarakat pada tahap ini untuk pemantauan internal. Oleh karena itu, dalam jangka panjang diharapkan mampu mendayagunakan sumber daya yang ada untuk membentuk sistem yang lebih mandiri di masyarakat.

- Tahap Terminasi.

Fase ini adalah fase pemisahan resmi dengan kelompok sasaran. Pemecatan program pemberdayaan masyarakat yang tidak jarang dilaksanakan bukan karena masyarakat sudah bisa dianggap mandiri, tapi lebih-lebih karena proyek harus dihentikan karena melebihi waktu yang telah ditentukan. Anggaran sudah siap dan tidak ada pemodal yang bisa melakukannya dapat dan akan terus berlanjut. Namun, para pejabat tetap tinggal harus meninggalkan kelompok sasaran secara perlahan dan tidak tiba-tiba. Ini harus dilakukan demi kepentingan masyarakat. Jangan merasa ditinggalkan dan tidak siap pejabat. Karena itu, ketika pejabat itu merasakan tugasnya. Jika masalah tidak diselesaikan dengan baik, pejabat jarang menindaklanjutinya, jika tidak secara teratur, maka secara teratur perlahan kurangi kontak dengan kelompok sasaran tersebut.²⁷

Dari hasil pengertian tahapan diatas, terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat dalam menjalankan sebuah program organisasi. Berikut pemaparan atau penjelasan faktor pendukung dan faktor penghambat:

- Faktor pendukung merupakan sebuah faktor yang mendukung dan mengajak bersifat untuk ikut serta dalam dukungan suatu kegiatan.

²⁷ Isbandi Rukminto Adi, *Pemikiran-Pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial,*, h. 182

- Faktor penghambat merupakan sebuah faktor yang sifatnya menghambat jalannya suatu kegiatan dan bersifat seperti menggagalkan suatu hal.²⁸

4. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), usaha mikro adalah badan usaha swasta atau perseorangan yang produktif dan memenuhi kriteria yang diatur dalam undang-undang. UMKM sendiri merupakan salah satu pilar yang berperan sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Hal ini dapat kita lihat ketika melihat krisis keuangan pada tahun 1998 dimana banyak perusahaan besar yang tumbang dan bangkrut akibat krisis keuangan yang sangat dahsyat yang menyebabkan inflasi mencapai 77,63%. Dengan inflasi yang begitu tinggi, sebagian besar masyarakat berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat kenaikan harga kebutuhan pokok pada saat itu. Pada saat seperti ini, peran UMKM sangat berguna dan mendukung perekonomian Indonesia.

a. Karakteristik UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

Karakteristik UMKM yaitu sifat atau kondisi faktual atau nyata yang melekat pada aktivitas usaha maupun perilaku pengusaha, yang bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya. Karakteristik ini yang menjadi ciri khusus antar pelaku usaha sesuai dengan skala usahanya. Menurut Bank Dunia, UMKM dapat dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu Usaha Mikro (jumlah karyawan 10 orang), Usaha Kecil (jumlah

²⁸ Dita Nurmayanti, dkk, "Manajemen Masjid Nurul Hayyu Dalam Membangun Kesadaran Shalat Berjamaah Di Desa Lakarama Kecamatan Towea Kabupaten Muna," *Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 2, No. 2, (November, 2022), h. 94.

karyawan 30 orang) dan Usaha Menengah (jumlah karyawan hingga 300 orang). Dalam perspektif usaha bisnis, UMKM digolongkan kedalam empat kelompok, yaitu:

- UMKM informal, contohnya pedagang kaki lima.
- Usaha Mikro adalah para UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya.
- Usaha Kecil Dinamis adalah kelompok UMKM yang mampu berwirausaha dengan cara menjalin kerjasama (menerima pekerjaan sub kontrak) dan ekspor.
- *Fast Moving enterprise* adalah UMKM yang mempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar.

Indonesia memiliki Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) No. 20 Tahun 2008. Undang-undang tersebut menjelaskan UKM sebagai berikut:

“Usaha yang tergolong UMKM adalah usaha kecil yang dimiliki dan dioperasikan oleh seseorang atau sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.” Tetap tunduk pada Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2013 tentang Pembinaan Usaha UMKM, Kemitraan, Perizinan, Koordinasi dan Pemantauan Amanat UMKM dan Ketentuan Peralihan. Kriteria UKM didasarkan pada tingkat omzet dan aset yang dimiliki UKM, yang dijelaskan dalam UU No. 20 Tahun 2008 sebagai berikut:

- Usaha Mikro yaitu usaha yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha yang memiliki kekayaan bersih atau aset maksimal

Lima Puluh Juta Rupiah dan hasil penjualan atau omset maksimal hingga tiga ratus juta rupiah

- Usaha kecil yaitu usaha yang memiliki nilai kekayaan bersih dari lima puluh juta rupiah hingga lima ratus juta rupiah dan hasil penjualan atau omzet sebesar tiga ratus juta rupiah hingga dua milyar lima ratus juta rupiah
- Usaha menengah yaitu usaha yang memiliki kekayaan bersih atau aset senilai lima ratus juta rupiah hingga sepuluh miliar rupiah dan nilai omzet atau pendapatan sebesar dua miliar lima ratus juta rupiah hingga lima puluh miliar rupiah.

Selain itu, tergantung dari aspek barang yang dihasilkan, UMKM juga memiliki karakteristik tersendiri, antara lain:

- Kualitasnya masih belum standar karena sebagian besar UMKM belum memiliki keterampilan teknis yang memadai. Produk manufaktur biasanya buatan tangan, sehingga standar kualitasnya berbeda-beda. Desain produk terbatas. Hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman terhadap produk tersebut. Sebagian besar UMKM bekerja berdasarkan kontrak, banyak yang tidak berani mencoba model baru.
- Jenis produk terbatas. Pada umumnya UMKM hanya memproduksi beberapa jenis produk. Ketika model baru diminta, akan sulit bagi UMKM untuk memenuhinya, bahkan jika mereka menerimanya, itu akan memakan waktu lama.
- Kapasitas produksi dan daftar harga terbatas. Kendalanya adalah sulitnya menentukan kapasitas dan harga produk sehingga menyulitkan konsumen untuk mengoperasikannya. Bahan baku berkualitas buruk. Karena bahan bakunya bersumber dari pemasok kualitas yang berbeda.

- Kontinuitas produk tidak terjamin dan tidak sempurna. Karena produknya belum biasa, maka produk yang dibuat biasanya apa adanya.²⁹

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus karena permasalahannya kompleks, dinamis dan penuh makna, penelitian ini dirancang untuk melihat sejauh mana peran koperasi serba usaha pakem berkah bersama.

2. Lokasi Penelitian dan Sumber Data

Berdasarkan taraf perekonomian di Tangerang masuk ke dalam tingkat menengah, karena Tangerang merupakan daerah yang strategis dan termasuk golongan daerah industri. Tingginya pertumbuhan UMKM di Tangerang, sangat dibutuhkan pengawasan serta informasi dalam hal yang berkaitan dengan bidang ekonomi. Data dinas koperasi dan UMKM Provinsi Banten di informasikan bahwa koperasi yang ada di Kabupaten Tangerang terus meningkat. Berdasarkan data tersebut peneliti memilih Kabupaten Tangerang sebagai lokasi penelitian dikarenakan Kabupaten Tangerang merupakan daerah dengan koperasi terbanyak setiap tahunnya, dan menjadi koperasi terbanyak dimana banyaknya koperasi yang non aktif.

Peneliti melakukan penelitian di lokasi dan juga menjadi sumber data yang dikerucutkan di Koperasi Pakem Berkah Bersama berada di

²⁹ Nurdianto Baskoro Adi, "Eksistensi UMKM Makanan Pada Era Jasa Pengiriman Makanan Berbasis Online (Go Food/Grab Food)," (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), h. 13-16.

Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Menurut Kristiani selaku ketua koperasi dan UMKM, 174 UMKM telah menjadi anggota koperasi ini. Dalam pemasarannya, Koperasi Pakem Berkah Bersama sudah melakukan melalui *online* dan *offline*. Beberapa kerjasama juga sudah terjalin ke beberapa instansi hingga BUMN.³⁰

3. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian

Fokus dan ruang lingkup dalam penelitian ini adalah peran koperasi pakem berkah bersama terhadap peningkatan kinerja UMKM, jadi bagaimana peran koperasi pakem berkah bersama ini dalam meningkatkan kinerja UMKM.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan sebuah data yang menyeluruh. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan seluruh data yang dapat memenuhi standar data yang di tetapkan.³¹ Maka dari itu teknik-teknik pengumpulan data tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang di teliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Observasi yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan yang di bantu melalui media visual/audio visual. Observasi dalam penelitian ini dilakukan

³⁰ Kristiani, Pendiri Koperasi PBB, Diwawancarai oleh Penulis, di Kantor koperasi tanggal 05 Februari 2023.

³¹ Nasir, Moh, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h.33.

untuk mengumpulkan data tentang peranan Koperasi Pakem Berkah Bersama (KPBB) Dalam Meningkatkan Kinerja UMKM seperti mengamati kegiatan-kegiatan yang dilakukan.³²

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam. Responden diambil untuk menjadi narasumber yaitu ketua Koperasi PBB, anggota UMKM, perangkat Desa, tokoh masyarakat.³³

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Satori dan Komariah menyebutkan studi dokumentasi adalah mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Dokumentasi diambil dari beberapa kegiatan UMKM dan Koperasi Pakem Berkah Bersama.³⁴

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data

³² Aan Komariah, Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 43.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h.15.

³⁴ Aan Komariah, Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,, h. 33.

dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

Menurut Sugiyono menjelaskan bahwa aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.³⁵

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Makin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Tahap ini dilakukan dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga dapat ditemukan hal-hal pokok dari yang diteliti berkenaan dengan Peran Koperasi Pakem Berkah Bersama terhadap Peningkatan Pemberdayaan Kinerja UMKM.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif,*, h.15.

b. *Data Display*

Setelah direduksi data, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Penyajian data data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Tahap ini dilakukan dengan merangkum hal-hal pokok yang ditemukan dalam susunan yang sistematis, yaitu data disusun dengan cara menggolongkannya dalam pola, tema, unit atau kategori, sehingga tema sentral dapat diketahui dengan mudah, kemudian diberi makna sesuai dengan materi penelitian.

c. *Verifikasi (Verification)*

Verifikasi adalah sebuah proses yang dilakukan selama penelitian berlangsung dengan melakukan beberapa cara, diantaranya: (1) memikirkan ulang selama penelitian dan penulisan, (2) meninjau ulang sebuah catatan yang diperoleh dari lapangan, (3) meninjau kembali pemikiran yang dikembangkan antar anggota peneliti dalam mengembangkan dan memperoleh kesepakatan bersama, (4) serta menempatkan salinan dalam sebuah temuan untuk seperangkat data yang lain.³⁶

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi, penyusunan mengacu pada buku pedoman penulisan karya ilmiah yang direkomendasikan oleh akademik Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Banten Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2021. Penyusunan diuraikan sebagai berikut :

³⁶ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," Alhadharah: *Jurnal Ilmu Dakwah* Vol. 17, No. 33, (Juni, 2018), Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Bab pertama, yaitu Pendahuluan, berisi pembahasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, yaitu, Gambaran umum Desa Sukamantri Koperasi Pakem Berkah Bersama. Berisi tentang kondisi umum masyarakat dan profil koperasi PBB.

Bab tiga, yaitu berisi tentang program dan strategi Koperasi PBB dalam meningkatkan pemberdayaan kinerja UMKM se-Kecamatan Pasar Kemis.

Bab empat, yaitu menjelaskan hasil penelitian, yaitu proses Koperasi PBB dalam memberdayakan masyarakat Desa Sukamantri Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang dalam pemberdayaan anggota UMKM dan menjelaskan manfaat koperasi serta memaparkan faktor pendukung dan penghambat.

Bab lima, yaitu penutup yang berisikan kesimpulan dari rumusan masalah dan saran-saran